



HAMBATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL PENYULUH AGAMA BUDDHA DALAM MENJELASKAN MODERASI BERAGAMA DI MAMUJU, SULAWESI BARAT

Eko Caram Atandito

STABN Raden Wijaya, Indonesia; tandinajah@gmail.com

Diserahkan: 16/12/2025

Direvisi: 18/03/2026

Diterima: 06/05/2026

DOI: 10.53565/abip.v12i1.2349

Abstrak Penelitian ini mengkaji hambatan komunikasi interpersonal yang dihadapi oleh penyuluh agama Buddha dalam menyampaikan moderasi beragama kepada komunitas Buddhis di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Penelitian ini didasarkan pada kebijakan nasional moderasi beragama tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menempatkan penyuluh agama sebagai aktor strategis dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi, khususnya di kalangan komunitas agama minoritas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi kegiatan penyuluhan, dan analisis dokumen resmi Kementerian Agama Sulawesi Barat. Partisipan penelitian meliputi penyuluh agama Buddha dan anggota komunitas Buddhis yang terlibat dalam program pembinaan keagamaan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola hambatan komunikasi interpersonal. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan utama, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama yang hanya dimaknai sebagai toleransi, kesulitan dalam memahami terminologi yang berkaitan dengan kebijakan, minimnya interaksi dua arah selama kegiatan penyuluhan, serta adanya ketidaksesuaian antara pedoman moderasi beragama tingkat nasional dengan ajaran Buddha yang dipahami di tingkat lokal. Hambatan-hambatan tersebut mengurangi efektivitas internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan moderasi beragama dalam komunitas Buddhis minoritas memerlukan strategi komunikasi interpersonal yang lebih dialogis, adaptif, dan terintegrasi secara kultural dengan ajaran Buddha agar pemahaman dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dapat berlangsung secara lebih bermakna.

Kata Kunci Komunikasi Interpersonal, Penyuluh Agama Buddha, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi prioritas kebijakan nasional Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2025. Peta Jalan Moderasi Beragama 2025–2029 menetapkan moderasi sebagai kerangka strategis penguatan kerukunan dan pembangunan harmoni

sosial. Kementerian Agama menegaskan bahwa moderasi harus dipahami sebagai “cara pandang beragama yang berorientasi pada keseimbangan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap keragaman” (Kemenag RI, 2025). Penetapan empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan budaya lokal, menunjukkan bahwa moderasi diposisikan sebagai konsep yang bersifat multidimensi dan bukan sekadar etika dasar berinteraksi. Kebijakan tersebut mengarahkan seluruh penyuluh agama untuk memastikan bahwa nilai moderasi dapat disampaikan secara konseptual dan terukur.

Konteks lokal Kabupaten Mamuju memperlihatkan dinamika yang unik dalam penyuluhan moderasi beragama. Data Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat menunjukkan bahwa jumlah umat Islam di Mamuju mencapai 217.465 jiwa, sedangkan umat Buddha hanya 137 jiwa pada tahun 2024. Kondisi demografis ini menempatkan komunitas Buddha sebagai kelompok minoritas dengan kebutuhan pembinaan komunikasi keagamaan yang berbeda dari komunitas mayoritas. Keberadaan penyuluh Buddha yang terbatas memperkuat urgensi pemahaman mendalam mengenai proses komunikasi interpersonal dalam penyuluhan agama. Situasi ini selaras dengan pernyataan Kemenag Sulbar (2025) bahwa “penyuluh agama memiliki posisi strategis sebagai penghubung nilai moderasi kepada komunitas-komunitas kecil yang rentan terpinggirkan secara informasi.”

Program moderasi beragama di Sulawesi Barat terus dijalankan melalui dialog kerukunan, pelatihan penyuluh, dan kegiatan edukatif lintas iman sepanjang 2024–2025. Kebijakan tersebut diarahkan agar pemahaman masyarakat mengenai moderasi tetap relevan dengan pedoman nasional. Dialog kerukunan tingkat provinsi pada November 2025 menegaskan bahwa moderasi tidak berhenti pada toleransi permukaan tetapi harus menjadi pemahaman substantif yang mempengaruhi sikap dan perilaku keagamaan. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa penyuluh, termasuk penyuluh Buddha di Mamuju, memikul peran penting dalam menerjemahkan konsep-konsep moderasi secara komunikatif dan kontekstual kepada umat.

Ketiadaan konflik antarumat beragama di Mamuju tidak dapat dipahami sebagai absennya hambatan komunikasi dalam penyuluhan keagamaan. Kondisi sosial yang harmonis sering menutupi masalah komunikasi interpersonal yang bersifat subtil, seperti perbedaan persepsi, kesenjangan pengetahuan, atau kurangnya keberanian umat untuk memberikan umpan balik kepada penyuluh. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Littlejohn (2017) bahwa “hambatan komunikasi paling sering muncul pada situasi yang secara sosial tampak stabil, karena ketidaksesuaian makna tidak terdeteksi secara langsung.” Pemahaman umat Buddha di Mamuju tentang moderasi juga belum tentu selaras dengan indikator moderasi beragama dalam pedoman Kemenag 2025, sehingga membutuhkan kajian empiris yang lebih mendalam.

Tantangan terbesar penyuluh Buddha di Mamuju muncul pada tingkat konseptual. Moderasi beragama kerap dipahami masyarakat hanya sebagai toleransi dasar, padahal konsep tersebut menuntut pemahaman kognitif yang memadai. Penyuluh menghadapi kesulitan ketika harus mengalihkan makna moderasi dari konsep abstrak ke pemahaman yang dapat diterapkan umat secara praktis. Hambatan tersebut terlihat dari kecenderungan komunikasi penyuluhan yang masih bersifat satu arah dan kurang membuka ruang dialog interpretatif. Teori komunikasi interpersonal Devito (2019) menegaskan bahwa “pemahaman pesan dipengaruhi oleh kesesuaian kerangka makna antara komunikator dan komunikan,” sehingga penyuluh perlu menyesuaikan gaya komunikasi dengan tingkat literasi keagamaan umat.

Literatur akademis menunjukkan keterbatasan penelitian yang menyoroti komunikasi interpersonal penyuluh Buddha di wilayah dengan populasi minoritas. Kajian mengenai penyuluh Buddha lebih banyak berfokus pada pembinaan moral atau pendidikan keagamaan, sehingga aspek komunikasi interpersonal, khususnya dalam konteks penyampaian moderasi di daerah minoritas, belum banyak diteliti. Kekosongan ini menurunkan pemahaman ilmiah mengenai bagaimana penyuluh Buddha membangun hubungan komunikatif, mengelola persepsi, dan menyesuaikan pesan dengan konteks sosial budaya umat. Penelitian berbasis data lapangan tahun 2025 diperlukan untuk memetakan pemahaman masyarakat Buddha mengenai moderasi serta hambatan yang muncul dalam proses penyuluhan.

Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi interpersonal yang dialami penyuluh Agama Buddha dalam menyampaikan moderasi beragama kepada umat di Mamuju. Penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk hambatan konseptual, linguistik, dan interaksional yang memengaruhi efektivitas penyampaian moderasi. Rekomendasi strategis bagi penyuluh akan disusun berdasarkan temuan empiris sehingga dapat digunakan untuk memperkuat kualitas komunikasi interpersonal dalam penyuluhan keagamaan. Harapannya, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan praktik komunikasi keagamaan yang lebih dialogis, adaptif, dan sesuai konteks masyarakat minoritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam hambatan komunikasi interpersonal yang dialami penyuluh Agama Buddha dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada umat Buddha di Kabupaten Mamuju. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, serta dinamika komunikasi yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya komunitas minoritas secara naturalistik. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Mamuju, dengan fokus pada Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro, yang

berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 merupakan pusat pembinaan umat Buddha. Beberapa vihara kecil yang aktif digunakan sebagai lokasi penelitian karena menjadi ruang utama pelaksanaan penyuluhan moderasi beragama, diskusi kelompok, dan pelatihan umat, sehingga menghadirkan situasi komunikasi interpersonal yang nyata antara penyuluh dan umat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap penyuluh Agama Buddha dan umat Buddha yang mengikuti kegiatan pembinaan untuk menggali pengalaman komunikasi, pemahaman moderasi beragama, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyuluhan. Observasi dilakukan pada kegiatan penyuluhan moderasi beragama yang merupakan bagian dari program Kementerian Agama Sulawesi Barat periode 2024–2025, dengan fokus pada pola interaksi dan efektivitas komunikasi. Analisis dokumen mencakup arsip resmi Kementerian Agama Sulawesi Barat tahun 2025 sebagai upaya validasi data dan pemahaman konteks kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Interaksi Penyuluh–Umat

Interaksi antara penyuluh Agama Buddha dan umat di wilayah Mamuju berlangsung melalui kegiatan pembinaan rutin, diskusi kelompok kecil, serta penyuluhan tematik mengenai moderasi beragama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa interaksi didominasi oleh komunikasi tatap muka dengan pola dialogis, meskipun intensitas komunikasi masih terbatas oleh jumlah penyuluh yang sedikit. Observasi lapangan memperlihatkan bahwa penyuluh menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dengan menyesuaikan gaya bahasa kepada tingkat pemahaman umat.

Interaksi juga ditandai oleh penggunaan penjelasan verbal yang bersifat repetitif untuk memperkuat pemahaman konsep moderasi. Umat cenderung merespon dengan pertanyaan klarifikasi mengenai istilah teknis yang berasal dari materi moderasi nasional. Situasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan adaptasi pesan agar sejalan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman keagamaan umat Buddha di tingkat lokal.

Interaksi yang diamati memperlihatkan bahwa sebagian umat lebih responsif terhadap penyampaian materi moderasi melalui contoh konkret dan analogi kehidupan sehari-hari. Penyuluh menyesuaikan metode komunikasi dengan menggabungkan pendekatan naratif, pemberian contoh, dan percakapan personal. Pola tersebut membantu meminimalkan jarak hierarkis antara penyuluh dan umat serta menciptakan suasana interaksi yang lebih egaliter.

Temuan interaksi penyuluh–umat menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif di komunitas minoritas membutuhkan adaptasi pesan, sebagaimana dinyatakan dalam teori komunikasi antarpribadi bahwa efektivitas komunikasi

dipengaruhi oleh kesesuaian pesan dengan konteks sosial penerima. Penggunaan bahasa yang disederhanakan dan penyampaian contoh konkret mendukung proses penyuluhan karena menurunkan hambatan linguistik dan kognitif yang dialami umat.

Penyesuaian metode penjelasan yang dilakukan penyuluh sejalan dengan prinsip komunikasi interpersonal yang menekankan empati, kejelasan pesan, dan kedekatan psikologis. Interaksi yang dialogis juga memperlihatkan adanya usaha penyuluh untuk membuka ruang partisipasi, sehingga umat dapat menyampaikan pertanyaan, keraguan, dan interpretasi mereka mengenai konsep moderasi. Pola interaksi ini relevan dengan situasi komunitas Buddha yang berjumlah kecil dan membutuhkan pendekatan personal agar pemahaman moderasi dapat diterima secara bertahap.

Temuan menunjukkan bahwa interaksi interpersonal berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara konsep moderasi beragama yang bersifat nasional dan realitas pemahaman umat pada konteks lokal. Kebutuhan adaptasi pesan menegaskan bahwa keberhasilan penyampaian moderasi tidak hanya bergantung pada materi, tetapi juga pada kualitas hubungan komunikasi antara penyuluh dan umat.

Kategori Hambatan	Tema	Indikator / Bukti Lapangan
Persepsi Moderasi	Pemahaman moderasi sebagai “toleransi permukaan”	Umat menyatakan: “Moderasi itu berarti menghormati agama lain, itu saja” (Wawancara Umat, Juni 2025)
Terminologi dan Bahasa	Kesulitan istilah teknis moderasi	Observasi penyuluhan: penyuluh menjelaskan istilah seperti “komitmen kebangsaan” dan “penerimaan budaya lokal” berulang kali dengan analogi lokal. Dokumen Kemenag Sulbar menyebutkan istilah ini dalam pedoman moderasi 2025.
Interaksi Komunikasi	Pola komunikasi satu arah	Observasi kegiatan di vihara: penyuluh menyampaikan materi panjang, tetapi sedikit pertanyaan dari umat; waktu tanya-jawab terbatas.
Interaksi Komunikasi	Adaptasi gaya komunikasi interpersonal	Wawancara penyuluh: “Saya menggunakan cerita kehidupan sehari-hari supaya umat lebih mudah memahami moderasi” (Penyuluh, Agustus 2025).
Kehadiran Referensi Agama Budha	Ketidaksesuaian pesan moderasi dengan ajaran Buddhis lokal	Analisis dokumen: pedoman Kemenag menyajikan konsep moderasi secara umum; penyuluh melaporkan kesulitan menjembatani konsep moderasi dengan filosofi Buddhis yang dikenal umat lokal.
Partisipasi Umat	Rendahnya umpan balik aktif dari umat	Observasi: banyak umat hanya mendengarkan tanpa mencatat atau bertanya, terutama dalam sesi pelatihan moderasi.

Kategori Hambatan	Data Lapangan	Dampak pada Penyuluhan
Perbedaan persepsi moderasi	Umat memahami moderasi sebagai “toleransi minimal” berdasarkan hasil wawancara tahun 2025.	Penyampaian nilai inti moderasi seperti keseimbangan, anti-ekstremisme, dan komitmen kebangsaan tidak sepenuhnya terserap oleh umat.
Hambatan bahasa dan istilah	Istilah moderasi beragama pada pedoman Kemenag 2025 sulit dipahami umat tanpa contoh konkret yang relevan dengan konteks lokal.	Penyuluh perlu mengulang penjelasan, menyederhanakan bahasa, dan menggunakan analogi berulang untuk memastikan pemahaman.
Minimnya interaksi dua arah	Observasi kegiatan penyuluhan tahun 2025 menunjukkan bahwa umat cenderung pasif, jarang bertanya, dan lebih banyak mendengarkan.	Penyuluh tidak dapat menilai tingkat pemahaman umat secara akurat sehingga evaluasi komunikasi menjadi terbatas.
Ketidaksepadanan referensi	Penyuluh mengacu pada pedoman moderasi Kemenag 2025, sedangkan umat merujuk pada tradisi Buddhis lokal yang lebih familiar.	Pesan moderasi dianggap kurang relevan sehingga penyuluh perlu menjembatani perbedaan perspektif teologis dan budaya.

Perbedaan Persepsi Moderasi

Perbedaan persepsi moderasi terlihat jelas dalam data lapangan tahun 2025. Umat masih memahami moderasi sebagai sikap toleransi minimal, bukan sebagai kerangka keberagaman yang bersifat reflektif. Pemahaman ini berada jauh di bawah tuntutan pedoman Kemenag 2025 yang menekankan empat indikator utama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Kesenjangan pemahaman ini menciptakan jarak epistemik antara penyuluh dan umat, karena penyuluh menggunakan konsep konseptual yang tidak dikenal dalam kerangka keagamaan umat sehari-hari.

Data wawancara memperlihatkan bahwa penyuluh harus mengulang materi secara berulang karena umat menafsirkan moderasi hanya sebagai perilaku etis yang umum. Pemahaman yang terbatas menyebabkan pesan penyuluhan tidak mencapai makna substantif mengenai keseimbangan beragama dan penolakan terhadap ekstremisme, sebagaimana ditekankan dalam dokumen moderasi Kemenag 2025. Kondisi ini

menunjukkan perlunya strategi komunikasi adaptif yang membantu umat memahami moderasi sebagai kewajiban reflektif, bukan sekadar etika sosial.

Tekanan Rasionalitas, Anti Kekerasan, dan Keseimbangan dalam Moderasi Beragama

Pedoman moderasi beragama tahun 2025 menempatkan rasionalitas, anti kekerasan, dan keseimbangan sebagai landasan utama. Tekanan pada rasionalitas mengharuskan umat menilai informasi keagamaan secara proporsional, menghindari klaim absolut, serta mengedepankan pertimbangan nalar. Tekanan pada anti kekerasan mencakup penolakan terhadap kekerasan fisik, verbal, simbolik, maupun kognitif. Tekanan pada keseimbangan beragama menuntut kemampuan menjaga harmoni antara beragama dan kehidupan sosial.

Data lapangan menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak dipahami secara utuh oleh umat. Minimnya pemahaman rasionalitas dalam moderasi berdampak pada kurangnya kemampuan umat menghubungkan moderasi dengan praktik Buddhis mereka. Pemahaman anti kekerasan sering kali direduksi menjadi larangan tindakan fisik semata. Sementara itu, keseimbangan beragama belum dipahami sebagai prinsip reflektif yang menuntut umat menghindari sikap ekstrem dalam menjalani kehidupan spiritualnya. Situasi ini menegaskan bahwa penyuluhan moderasi perlu berfokus pada penguatan literasi konseptual yang lebih mendalam.

Moderasi Dipahami Sebagai Nilai Etika Umum, Bukan Konsep Reflektif

Pemaknaan moderasi oleh umat yang masih bersifat etis dan umum menyebabkan pesan penyuluhan kehilangan kedalaman reflektif yang seharusnya melekat dalam konsep moderasi beragama. Pemahaman moderasi sebagai sikap ramah dan tidak menyinggung agaknya cukup bagi umat, sehingga konsep lain seperti pengendalian klaim kebenaran, keterbukaan dialog, dan kapasitas menimbang konteks sosial tidak muncul dalam interpretasi mereka.

Data wawancara 2025 menunjukkan bahwa umat lebih mengaitkan moderasi dengan perilaku sosial daripada dengan prinsip keberagamaan yang mengatur pola pikir dan cara beragama. Pemahaman seperti ini membuat moderasi tidak diposisikan sebagai prinsip teologis dan filosofis yang seharusnya diinternalisasi melalui proses refleksi personal. Penyuluh menghadapi tantangan untuk membawa umat dari pemahaman dangkal menuju pemahaman yang lebih rasional dan reflektif sebagaimana dituntut pedoman nasional.

Hambatan Bahasa dan Terminologi

Hambatan terminologis menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam proses penyuluhan. Istilah seperti komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap tradisi memerlukan penjelasan panjang dan berulang. Istilah-istilah tersebut

berasal dari diskursus kebijakan negara, bukan dari kosakata keagamaan yang lazim digunakan dalam pembinaan agama Buddha.

Data lapangan menunjukkan bahwa umat sering kali mengalami kesulitan memahami istilah moderasi karena ketidaksiapan literasi terminologi keagamaan. Penyuluh menggunakan istilah resmi Kemenag 2025, sedangkan umat mengandalkan istilah Buddhis tradisional seperti *dāna*, *sīla*, dan meditasi. Situasi ini menciptakan jarak pemaknaan yang membuat penyampaian pesan penyuluhan terhambat. Analogi, contoh konkret, dan penjelasan bertahap menjadi kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dalam proses komunikasi interpersonal penyuluh.

Kesenjangan Literasi Terminologi Keagamaan

Kesenjangan literasi terminologi memperlihatkan perbedaan tingkat pemahaman antara penyuluh dan umat. Umat lebih familiar dengan istilah yang bersifat ritual dan etis, sedangkan istilah moderasi yang normatif dan kebijakan tidak memiliki padanan langsung dalam tradisi keagamaan mereka. Kondisi ini menyebabkan pesan penyuluhan mudah disalahpahami atau diterima secara parsial tanpa pemahaman makna yang mendalam.

Penyuluh harus mengatasi kesenjangan ini dengan menjembatani kedua sistem terminologi. Penyederhanaan bahasa, penggunaan ilustrasi lapangan, serta penyusunan materi yang lebih dekat dengan pengalaman spiritual umat menjadi bagian dari strategi komunikasi yang diperlukan untuk memastikan pesan moderasi dapat dipahami dengan baik.

Minimnya Interaksi Dua Arah dalam Komunikasi Interpersonal

Pola komunikasi satu arah mendominasi proses penyuluhan moderasi beragama di Mamuju. Umat jarang memberikan umpan balik atau mengajukan pertanyaan selama sesi penyuluhan. Observasi 2025 menunjukkan bahwa situasi ini membuat penyuluh kesulitan mengetahui apakah materi benar-benar dipahami.

Minimnya interaksi dua arah menghambat proses internalisasi konsep moderasi karena tidak tersedia ruang dialog yang memungkinkan umat mengklarifikasi makna, memberikan respons kritis, atau mengaitkan konsep dengan pengalaman mereka. Penyampaian yang bersifat informatif tidak cukup untuk menanamkan nilai moderasi yang menuntut refleksi. Penyuluh harus merancang pendekatan komunikatif yang mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kualitas diskusi.

Dampak Keterbatasan Interaksi terhadap Pemahaman Moderasi

Keterbatasan interaksi dua arah menyebabkan umat tidak memiliki kesempatan untuk mendalami konsep moderasi melalui dialog. Pengalaman lapangan memperlihatkan bahwa pemahaman umat menjadi pasif dan dangkal. Moderasi diterima sebagai ajaran

normatif, bukan sebagai nilai reflektif yang memerlukan internalisasi melalui pengalaman personal, dialog, dan klarifikasi konseptual.

Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan metode komunikasi interpersonal yang melibatkan tanya jawab, studi kasus, dan diskusi kelompok untuk memastikan bahwa konsep moderasi beragama dipahami tidak hanya sebagai informasi, tetapi sebagai prinsip keberagamaan yang harus diterapkan.

Ketidaksepadanan Referensi Keagamaan

Umat Buddha di Mamuju lebih akrab dengan ajaran *dāna*, *sīla*, dan meditasi. Praktik ini menjadi dasar pembinaan spiritual mereka. Di sisi lain, penyuluh membawa materi moderasi beragama yang bersifat normatif dan kebijakan. Ketidaksesuaian referensi ini menciptakan hambatan kognitif bagi umat untuk memahami keterkaitan antara ajaran Buddha dan moderasi beragama.

Data lapangan menunjukkan bahwa umat menafsirkan moderasi melalui lensa ritual dan etika tradisional, sehingga konsep seperti anti kekerasan simbolik atau komitmen kebangsaan tidak mudah dipahami. Situasi ini memperlihatkan perlunya penyuluh membangun jembatan konseptual antara moderasi dan ajaran Buddha.

Kebutuhan Penyelarasan Moderasi dengan Ajaran Buddha

Penyuluh perlu menyelaraskan moderasi dengan ajaran Buddhis agar pesan memiliki relevansi langsung dengan pengalaman keagamaan umat. Prinsip *Majjhima Paṭipadā*, *mettā*, dan *karuṇā* memiliki potensi kuat untuk menjadi dasar internalisasi moderasi. Penyelarasan ini memungkinkan umat memahami moderasi bukan sebagai aturan luar, tetapi sebagai nilai yang sejalan dengan inti ajaran agama mereka.

Data wawancara 2025 menunjukkan bahwa umat lebih mudah menerima moderasi ketika dikaitkan dengan konsep Jalan Tengah. Pendekatan ini membantu penyuluh mengontekstualisasikan indikator moderasi dalam kerangka yang akrab bagi umat. Penyelarasan konseptual tersebut mengurangi kesenjangan referensi keagamaan dan memperkuat pemahaman moderasi sebagai nilai reflektif dalam kehidupan spiritual dan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai hambatan komunikasi interpersonal penyuluh Agama Buddha dalam menjelaskan moderasi beragama kepada umat di Kabupaten Mamuju tahun 2025 menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan dipengaruhi oleh berbagai kendala yang bersifat konseptual, linguistik, interaksional, dan referensial. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa perbedaan persepsi mengenai moderasi menjadi hambatan utama. Umat masih memaknai moderasi sebatas toleransi dasar, sehingga terjadi kesenjangan

makna dengan konsep moderasi versi Kementerian Agama yang bersifat reflektif, rasional, dan multidimensi. Kesenjangan ini membuat penyampaian nilai inti moderasi, seperti keseimbangan dan anti-kekerasan, tidak sepenuhnya dipahami umat.

Kesulitan terminologi menjadi hambatan berikutnya. Istilah teknis yang tercantum dalam pedoman moderasi Kemenag 2025 tidak mudah dipahami oleh umat Buddha yang lebih familiar dengan terminologi Buddhis tradisional. Situasi ini membuat penyuluh harus melakukan penjelasan berulang melalui analogi dan penyederhanaan bahasa untuk menjembatani kesenjangan literasi. Minimnya interaksi dua arah turut memperkuat hambatan komunikasi. Pola komunikasi satu arah menyebabkan penyuluh tidak dapat mengevaluasi secara akurat sejauh mana pesan dipahami, sehingga proses internalisasi nilai moderasi berlangsung secara terbatas.

Selain itu, ketidaksepadanan referensi keagamaan antara penyuluh dan umat menimbulkan hambatan dalam penyelarasan makna moderasi. Penyuluh menggunakan pedoman moderasi nasional, sedangkan umat merujuk pada praktik keagamaan yang berakar pada tradisi lokal. Ketidaksesuaian kerangka referensi ini menyebabkan pesan moderasi kurang relevan bagi umat tanpa upaya adaptasi konseptual.

Hasil penelitian menegaskan bahwa penyuluhan moderasi pada komunitas minoritas Buddha memerlukan strategi komunikasi interpersonal yang lebih dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Penyuluh membutuhkan pelatihan komunikasi berbasis dialog untuk memperkuat kemampuan membuka ruang umpan balik dan meningkatkan pemahaman umat secara lebih mendalam. Pengembangan modul moderasi berbasis ajaran Buddha juga menjadi kebutuhan penting agar moderasi dapat dipahami sebagai bagian integral dari praktik spiritual umat, bukan sebagai konsep eksternal yang terpisah dari tradisi mereka. Penyesuaian strategi komunikasi dan bahan ajar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyuluhan serta mendukung keberhasilan program moderasi beragama di wilayah Mamuju.

REFERENSI

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- DeVito, J. A. (2019). *The interpersonal communication book* (15th ed.). Pearson.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Peta jalan moderasi beragama 2025–2029*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Pedoman penguatan moderasi beragama*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
- Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. (2025). *Laporan pelaksanaan program moderasi beragama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024–2025*. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.